

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam suatu perusahaan selalu terdapat sistem pengelolaan administrasi, sistem administrasi merupakan suatu sistem penting dan mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam suatu perusahaan yang bertujuan agar perusahaan dapat semakin berkembang dan bertumbuh sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Administrasi adalah suatu usaha atau kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan seperti penyusunan , perencanaan, pencatatan data secara berututan, pengendalian, dan pengorganisasian pekerjaan suatu perusahaan untuk mencapai suatu tujuan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana tertentu.

Pajak adalah pungutan wajib atau kontribusi wajib kepada negara yang harus dibayar oleh rakyat yang bersifat memaksa bagi setiap warga negara yang sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif berdasarkan undang – undang perpajakan, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung atau tidak langsung merasakan manfaat pajak yang telah dibayarkan karena pajak yang telah dibayarkan digunakan untuk kepentingan negara seperti pemerintah dan masyarakat umum yang bertujuan untuk kemakmuran bangsa. Pajak merupakan aspek yang sangat penting dan termasuk sumber pendapatan yang utama untuk pembangunan di suatu negara khususnya di negara Indonesia, karena

pembangunan bertujuan untuk mewujudkan serta meningkatkan kesejahteraan suatu bangsa. Pendapatan dari penerimaan pajak yang berasal dari rakyat merupakan kontribusi dalam menunjang pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan. Masyarakat Indonesia harus mengerti tentang pajak dan tata cara perpajakan agar tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan dalam pembayaran pajak. Oleh karena itu pemerintah mengatur mengenai hal - hal yang berhubungan dengan pajak, diantaranya wajib pajak, subjek pajak, objek pajak, dan tata cara perhitungan pajak.

Pajak memiliki beberapa fungsi bagi negara dan masyarakat, yaitu fungsi anggaran , fungsi mengatur, fungsi pemerataan, dan fungsi stabilisasi. Fungsi anggaran dari pajak adalah menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara. Fungsi mengatur dari pajak yaitu sebagai alat penggerak dan pendorong masyarakat dalam sarana perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Fungsi pemerataan pajak digunakan untuk menyeimbangkan pendapatan dengan kesejahteraan masyarakat. Fungsi stabilisasi untuk menjaga stabilitas kondisi dan keadaan perekonomian negara. Sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem *self assesment*. Dengan sistem tersebut Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang dalam satu tahun pajak. Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) terutang dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan.

Institusi yang menangani masalah pajak adalah Direktorat Jenderal Pajak. Direktorat Jenderal Pajak diberi wewenang untuk melaksanakan pemeriksaan perpajakan (*tax audit*). Pemeriksaan mewajibkan wajib pajak untuk menunjukkan,

memperlihatkan, dan meminjamkan dokumen – dokumen yang diperlukan untuk pemeriksaan perpajakan berupa pencatatan administrasi dan pembukuan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas mereka. Direktorat Jenderal Pajak juga membutuhkan laporan keuangan dari pembukuan wajib pajak guna menghitung kewajiban perpajakan wajib pajak.

Laporan keuangan merupakan hasil dari kegiatan akuntansi yang meliputi kegiatan pencatatan transaksi – transaksi dan informasi keuangan pada suatu periode akuntansi yang dilakukan oleh perusahaan untuk menggambarkan kinerja perusahaan, penggolongan transaksi ke dalam akun buku besar, dan pengikhtisarian data transaksi. Laporan keuangan diperoleh dari proses akuntansi yang meliputi pencatatan, pengklasifikasian, peringkasan, pengolahan dan penyajian data transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan.

Laporan keuangan wajib digunakan sebagai dasar perhitungan kewajiban perpajakan, oleh karena itu setiap badan usaha diwajibkan melakukan kegiatan akuntansi atau pembukuan atas setiap transaksi yang dilakukan selama satu periode masa pajak. Ketentuan pasal 13 ayat (1) UU No.7/1983 sebagaimana dijelaskan pasal 28 UU No.6/1983 menegaskan bahwa wajib pajak dalam negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha dan atau pekerjaan bebas wajib menyelenggarakan pembukuan di Indonesia sehingga dari pembukuan tersebut dapat dihitung besarnya penghasilan kena pajak. Ketentuan pasal 13 ayat (2) UU No. 7 / 1983 sebagaimana dijelaskan pasal 28 ayat (40) UU No.6 / 1983 menegaskan kembali pada setiap tahun pajak yang berakhir wajib pajak diwajibkan membuat pembukuan yang meliputi neraca dan perhitungan laba rugi

berdasarkan prinsip pembukuan taat asas (konsisten) dengan tahun sebelumnya. Kegiatan perusahaan meliputi pemberian modal, penerimaan penghasilan perusahaan, pembelian barang – barang produksi, penggajian karyawan, pemakaian jasa dengan pihak ketiga, asset perusahaan.

Kegiatan perusahaan melibatkan banyak transaksi dalam setiap periode yang dimana sebagian transaksi – transaksi tersebut merupakan objek pajak. Yang merupakan objek pajak penghasilan adalah penghasilan, menurut undang – undang Pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Kegiatan perusahaan membutuhkan sumber daya manusia (SDM) untuk menjalankan roda perusahaan. SDM dalam perpajakan yaitu orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja atau yang disebut pegawai, baik sebagai pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berdasarkan perjanjian melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan yang dibayarkan berdasarkan periode tertentu. Perusahaan harus melakukan pencatatan dalam melakukan penggajian atau pengupahan terhadap pegawainya.

Pajak Penghasilan Pasal 21 dikenakan terhadap imbalan atas pekerjaan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Pemotongan PPh Pasal 21 seharusnya

disajikan dalam laporan keuangan. Peran sistem administrasi pajak sangat besar bagi badan usaha untuk mengetahui gambaran yang sebenarnya mengenai laporan keuangan perusahaan, hasil dari analisis digunakan oleh berbagai pihak intern maupun ekstern perusahaan dalam pengambilan keputusan sehingga kondisi keuangan diketahui kebenarannya khususnya dalam Pajak Penghasilan Pasal 21. Jika PPh Pasal 21 tidak diatur dengan baik akan menimbulkan sanksi perpajakan, sanksi PPh Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri.

PT Metro Jatim Raya Surabaya merupakan sebuah perusahaan yang memproduksi berbagai macam kabel ducting dan pipa air yang terbuat dari bahan PVC dalam berbagai ukuran yang terdaftar di KPP kota Gresik, Jawa Timur. PT Metro Jatim Raya Surabaya sebagai wajib pajak memiliki kewajiban untuk memotong PPh Pasal 21 dari pegawainya baik pegawai tetap maupun pegawai kontrak atau pegawai lepas. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dalam Tugas Akhir dengan judul **“Sistem Administrasi Pemotongan PPh Pasal 21 pada PT Metro Jatim Raya Surabaya (Studi Lapang di Perusahaan PT Metro Jatim Raya Surabaya)”**

1.2 Tujuan Studi Lapang

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem administrasi pemotongan PPh Pasal 21 pada PT Metro Jatim Raya Surabaya.
2. Untuk mengetahui proses perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 atas pegawai pada PT Metro Jatim Raya Surabaya.
3. Untuk mengetahui proses penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 atas pegawai PT Metro Jatim Raya Surabaya.

1.3 Manfaat Studi Lapang

Studi lapang diharapkan dapat menambah wawasan serta manfaat untuk berbagai pihak. Adapun manfaat studi lapang adalah :

1. Bagi mahasiswa
 - a. Dapat menambah pengetahuan tentang pelaksanaan alur dan metode sistem administrasi perpajakan khususnya dalam pemotongan PPh pasal 21 yang dilakukan di perusahaan.
 - b. Sebagai sumber informasi tentang sistem administrasi pemotongan PPh Pasal 21.
 - c. Dapat mengetahui proses pelaporan dan pemotongan PPh Pasal 21 atas pegawai PT Metro Jatim Raya Surabaya.
 - d. Dapat mengetahui proses penyetoran pajak PPh Pasal 21 atas pegawai PT Metro Jatim Raya Surabaya.

2. Bagi Perusahaan PT Metro Jatim Raya Surabaya

- a. Sebagai bahan masukan bagi PT Metro Jatim Raya Surabaya untuk memecahkan masalah - masalah yang dihadapi khususnya tentang PPh Pasal 21 perusahaan.

3. Bagi Pembaca

- a. Sebagai tambahan informasi bagi mahasiswa yang akan menyusun laporan tugas akhir yang berkaitan dengan sistem administrasi perpajakan.
- b. Sebagai bahan referensi untuk pembaca yang akan mengangkat topik yang sama.

1.4 Ruang Lingkup Studi Lapang

Ruang lingkup adalah batasan atas pembahasan suatu masalah yang akan dibahas, agar pembahasan suatu masalah tidak terlalu luas dan tidak terjadi kesalahan dalam penyelesaian masalah tersebut. Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah PT Metro Jatim Raya Surabaya.

Batasan - batasan dalam penulisan Tugas Akhir ini difokuskan pada pencatatan administrasi pemotongan PPh pasal 21 yang dilakukan oleh PT Metro Jatim Raya Surabaya dan pencatatan data administrasi yang hanya sebatas upah tenaga kerja dan BPJS ketenagakerjaan yang dilakukan oleh PT Metro Jatim Raya Surabaya.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Metode penulisan yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data yang relevan adalah metode penelitian deskriptif. Menurut Nazir (dalam Contoh Metode Penelitian, 1988: 63) “Metode deskriptif adalah suatu metode yang meneliti status sekelompok atau sekumpulan manusia, suatu objek, suatu sistem pemikiran atau peristiwa pada masa sekarang yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran, dan keakuratan mengenai fakta-fakta, serta sifat yang berhubungan dengan fenomena – fenomena tertentu”.

Sumber data diperoleh dari studi lapang di PT Metro Jatim Raya Surabaya. Sumber data berasal dari data gaji, data BPJS pegawai, data pegawai tetap dan pegawai lepas, laporan keuangan. Sumber data lain diperoleh dari membaca, memahami buku – buku dan teori – teori yang berhubungan dengan Laporan Tugas Akhir ini. Dari data yang diperoleh dan dikumpulkan, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan cara melakukan :

1. Observasi

Cara pengambilan data dengan mempelajari dokumen-dokumen tertulis yang didapatkan dari berbagai macam sumber berupa buku, data elektronik, dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian dilakukan secara langsung di objek penelitian yaitu pada PT Metro Jatim Raya Surabaya melalui studi kasus. Cara yang dilakukan berupa mengikuti kegiatan perusahaan melalui pekerjaan yang diberikan dan mengambil data dari informasi yang didapat selama kegiatan berlangsung.

2. Dokumentasi

Dilakukan dengan mencatat dan mempelajari data – data berupa tulisan, dokumen – dokumen atau arsip yang ada pada objek penelitian yang terkait. Dokumentasi yang diperoleh dari PT Metro Jatim Raya Surabaya diantaranya seperti daftar tenaga kerja, daftar gaji, daftar bpjs ketenagakerjaan dan dokumen lain yang diperlukan sebagai bukti administrasi yang dilakukan PT Metro Jatim Raya Surabaya. Dokumentasi bertujuan untuk membuktikan suatu data tersebut memang benar ada atau benar terjadi dengan melakukan penelusuran atas data yang tertulis baik dari dokumen, buku, laporan harian, laporan bulanan, rekapan gaji dan data tertulis lainnya.

3. Wawancara

Merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dengan bertatap muka secara langsung antara pewawancara dengan responden. Penulis melakukan wawancara dan bertanya langsung pada bagian Perpajakan PT Metro Jatim Raya Surabaya yang bertujuan mendapatkan informasi mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21, data- data pemotongan pajak, data - data lain dan fakta –fakta yang terkait dengan pembahasan pada Laporan Tugas Akhir ini. Pertanyaan yang diajukan seperti tentang data – data perpajakan, bagaimana proses pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan perusahaan dan pertanyaan – pertanyaan lain yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang bermanfaat untuk pembahasan Laporan Tugas Akhir ini.